

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
- c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
- d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- e. Pergub 89 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- f. Surat Edaran Gubenur No 903/0024475 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dari rumusan prioritas pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode pembangunan 2018-2023, Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Pada pencapaian visi, diperlukan pemahaman dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan landasan filosofis "Jawa Tengah Berdikari Dan Semakin Sejahtera, (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", maka pernyataan visi dijabarkan pada 4 (empat) rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Misi 3 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- d. Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak (*urgent*), penting (*important*), menjadi penghela (*prime mover*), serta pengungkit (*leverange*). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 240 ayat 2 bahwa SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD (BPKAD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pasal 4 Ayat 1 bahwa Pemda menerapkan SAP Berbasis Akrual,
- c. Permendagri No 64 Thn 2013 ttg Penerapan SAP berbasis Akrual pada Pemda.
- d. Peraturan Gubernur No 45 Thn 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- e. Pergub 89 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
- f. Surat Edaran Gubenur No 903/0024475 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
- BAB VII PENUTUP

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Dari rumusan prioritas pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, untuk periode pembangunan 2018-2023, Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Pada pencapaian visi, diperlukan pemahaman dan pengertian dari seluruh rumusan visi tersebut agar dapat menggambarkan tata nilai dan falsafah yang dianut bersama. Dari rumusan tersebut dan sejalan dengan landasan filosofis "Jawa Tengah Berdikari Dan Semakin Sejahtera, (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi", maka pernyataan visi dijabarkan pada 4 (empat) rumusan Misi Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Misi 1 : Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Misi 2 : Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota;
- c. Misi 3 : Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
- d. Misi 4 : Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak (*urgent*), penting (*important*), menjadi penghela (*prime mover*), serta pengungkit (*leverange*). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Penetapan arah belanja daerah: belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus mempertimbangkan masa efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BPBD Prov. Jateng
Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		Realisasi		Ket
		Anggaran	Realisasi	Fisik (%)	Keu (%)	
I	PROGRAM : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	4.550.000.000	3.720.409.673	100	81.77	Efisiensi
-	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.730.000.000	1.583.066.000	100	91.51	Efisiensi
-	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Dan Kearsipan Perangkat Daerah	300.000.000	291.274.352	100	97.09	Efisiensi
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Dan Listrik Perangkat Daerah	580.000.000	566.625.386	100	97.69	Efisiensi
-	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	250.000.000	218.183.535	100	87.27	Efisiensi
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	535.000.000	509.418.200	100	95.22	Efisiensi
-	Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah Perangkat Daerah	1.500.000.000	1.487.037.455	100	99.14	Efisiensi
-	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	200.000.000	188.461.570	100	94.23	Efisiensi
-	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/buku Perpustakaan Perangkat daerah	30.000.000	28.178.000	100	93.93	Efisiensi
-	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.250.000.000	1.247.584.870	100	99.81	Efisiensi
-	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	500.000.000	478.780.950	100	95.76	Efisiensi
-	Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kantor	1.450.000.000	1.425.337.300	100	98.3	Efisiensi
-	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.003.000.000	62.520.905	100	6.23	Sesuai kebutuhan
-	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	32.000.000	31.500.000	100	98.44	Efisiensi
-	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Formal	100.000.000	69.478.856	100	69.48	Efisiensi
-	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	630.000.000	617.022.071	100	97.94	Efisiensi
-	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	97.980.451	100	97.98	Efisiensi
-	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	720.000.000	684.810.955	100	95.11	Efisiensi
M	PROGRAM : PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	760.000.000	728.342.520	100	95.83	Efisiensi
-	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	460.000.000	443.472.167	100	96.41	Efisiensi
-	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	284.870.353	100	94.96	Efisiensi
III	PROGRAM : PENYELENGGARAAN PENANGULANGAN BENCANA	17.930.000.000	16.793.543.659	100	93.66	Efisiensi
-	Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	2.000.000.000	1.981.983.820	100	99.1	Efisiensi
-	Kegiatan Pemetaan Dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana	2.900.000.000	2.867.936.008	100	98.89	Efisiensi
-	Kegiatan Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jateng	1.800.000.000	1.780.958.111	100	98.94	Efisiensi

No	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		Realisasi		Ket
		Anggaran	Realisasi	Fisik (%)	Keu (%)	
	- Kegiatan Peningkatan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan/pra Bencana	1.800.000.000	1.694.497.137	100	94.14	Efisiensi
	- Kegiatan Peningkatan, Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat Bagi Pemangku Kepentingan Dan Generasi Muda	800.000.000	747.935.500	100	93.49	Efisiensi
	- Kegiatan Pengembangan Pusdalops Jateng	600.000.000	581.845.000	100	96.97	Efisiensi
	- Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, Dan Penanganan Darurat Bencana	1.020.000.000	953.345.000	100	93.47	Efisiensi
	- Kegiatan Bintel Sar, Latihan Gabungan Dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng	500.000.000	496.523.900	100	99.30	Efisiensi
	- Kegiatan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Jateng	750.000.000	742.965.141	100	99.06	Efisiensi
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pb Dalam kajian Kebutuhan Pasca Jateng	400.000.000	393.196.028	100	98.30	Efisiensi
	- Kegiatan Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng	600.000.000	582.611.402	100	97.10	Efisiensi
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Logistik Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana	2.700.000.000	2.626.102.400	100	97.26	Efisiensi
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng	2.060.000.000	1.343.634.812	100	89.70	Efisiensi

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak ada kendala dan hambatan yang mengganggu pencapaian target kinerja.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan daerah adalah basis akrual. Akun ekuitas disebut sebagai sekuitas dana yang terperinci menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi aset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai aset tetap.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standart Akuntansi Pemerintah pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan system akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Belanja

5.1.1.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 32.051.003.057,- atau 93,27% dari anggaran Rp. 33.642.725.000,- dan untuk Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 29.361.709.171,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp. 12.091.788.000,-	Rp. 11.069.829.882,-	89,59	Rp. 10.995.652.871,-
Belanja Barang & Jasa	Rp. 21.550.937.000,-	Rp. 20.981.173.175,-	97,36	Rp. 18.366.056.300,-
Jumlah	Rp. 33.642.725.000,-	Rp. 32.051.003.057,-	93,27	Rp. 29.361.709.171,-

5.1.1.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.11.069.829.882,- atau 91,55% dari anggaran Rp.12.091.788.000,- dan untuk Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.995.652.871,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp. 7.810.538.000	Rp. 6.997.764.882,-	89,59	Rp. 7.439.248.771,-
Belanja Barang & Jasa	Rp. 4.281.250.000,-	Rp. 4.072.065.000,-	97,36	Rp. 3.556.404.100,-
Jumlah	Rp. 12.091.788.000,-	Rp. 11.069.829.882,-	91,55	Rp. 10.995.652.871,-

5.1.1.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 20.761.019.824,- atau 96,33% dari anggaran Rp. 21.550.937.000,- dan untuk Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 18.157.705.222,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 4.052.007.000,-	Rp. 3.994.219.850,-	98,57	Rp. 3.779.741.901,-
Belanja Bahan/Material	Rp. 2.145.255.000,-	Rp. 2.087.115.800,-	97,29	Rp. 1.985.695.750,-
Belanja Jasa Kantor	Rp. 2.644.015.000,-	Rp. 2.537.673.665,-	95,98	Rp. 2.448.387.211,-
Belanja Premi Asuransi	Rp. 250.000.000,-	Rp. 218.183.535,-	87,72	Rp. 157.563.194,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 200.000.000,-	Rp. 199.999.000,-	100,00	Rp. 423.648.922,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 400.081.000,-	Rp. 391.599.675,-	97,98	Rp. 512.288.818,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp. 1.413.670.000,-	Rp. 1.352.659.805,-	95,68	Rp. 658.330.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	-	-	Rp. 4.000.000
Belanja Sewa Alat Berat	-	-	-	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 16.200.000,-	Rp. 16.200.000,-	100,00	Rp. 49.925.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 2.278.280.000,-	Rp. 2.241.160.820,-	98,37	Rp. 1.750.705.507,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp. 32.000.000	Rp. 31.500.000	-	-
Belanja Pakaian Kerja	Rp. 554.750.000,-	Rp. 553.610.000,-	99,79	Rp. 1.309.002.500,-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 6.235.229.000,-	Rp. 6.048.518.155,-	97,01	Rp. 4.800.495.522,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp. 22.500.000,-	Rp. 7.700.000,-	98,00	Rp. 29.400.000,-

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.253.000.000,-	Rp. 1.248.944.870,-	99,68	Rp. 764.730.897,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp. 49.950.000,-	Rp. 49.900.000,-	98,35	Rp. 34.000.000,-
Belanja Barang & Jasa BLUD	-	-	-	-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	-	-
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	-	-	-	Rp. 49.790.000,-
Belanja Hadiah Barang	-	-	-	-
Jumlah	Rp. 21.550.937.000,-	Rp. 20.761.019.824,-	96,33	Rp. 16.167.705.222,-

5.1.1.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2,055,908,860,- atau 54,56% dari anggaran Rp. 3,767,813,000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3,822,644,000,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-	-	Rp. 2,176,558,500,-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 3,767,813,000,-	Rp. 2,055,908,860,-	-	Rp. 1,646,086,000,-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	Rp. 3,767,813,000,-	Rp. 2,055,908,860,-	54,56	Rp. 3,822,644,500,-

5.1.1.1.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0,-. Dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1,937,483,860,- dari anggaran Rp.3,646,488,000,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,174,897,500,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 2.424.500.000,-	Rp. 747.331.860,-	30,82	Rp.1.394.112.500,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	-	-	-	Rp. 65.750.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	Rp. 8.978.000,-	Rp. 6.791.400,-	43,37	Rp. 293.700.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	Rp. 518.460.000,-	Rp. 501.764.600,-	75,64	Rp. 141.289.000,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	Rp. 694.550.000,-	Rp. 681.596.000,-	98,13	Rp. 280.046.000,-
Jumlah	Rp. 3.646.488.000,-	Rp.1.937.483.860,-	53,13	Rp. 2.174.897.500,-

5.1.1.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0 dari anggaran dan Realisasi untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1,646,086,000,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	-	-	-	Rp.1,646,086,000,-
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	Rp.1,646,086,000,-

5.1.1.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.0,- dari anggaran Rp.0,- dan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 0,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	Realisasi 2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	-	-	-	-
Belanja Instalansi dan Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

5.1.1.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 0 dari anggaran Rp. 0,- dan untuk Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1,661,000,- Dengan rincian sebagai berikut:

	2019		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	-	-	-	Rp 1,661,000,-
Jumlah	-	-	-	Rp. 1.661,000,-

5.1.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 34.106.911.917,- sedangkan Tahun 2018 sebesar Rp. 33,184,893,671,-

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

5.2.1 Aset

Total Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14,558,965,568,30 turun sebesar Rp. 673,819,038,55 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.232.784.606,85,-

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 200,290,336,- naik sebesar Rp. 74,283,254.12,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 126.007.081,88,-

5.2.1.1.1 Kas

Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas BLUD	-	-
Jumlah	-	-

5.2.1.1.1.1 Kas di Bendaharan Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

No	Uraian	2019	2018
1.			-
2.		-	-
	Jumlah		-

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO	URAIAN	Nilai	Penyetoran
1.	-	-	-
2.	-	-	-
	Jumlah	-	-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran – Kewajiban Pihak Lain

Terdapat saldo kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 yang akan dipergunakan untuk membayar hutang pajak kepada pihak ketiga sebesar Rp. 121,818,-. Sedangkan semua kewajiban kepada pihak ketiga kegiatan yang sudah SPJ dan masuk LRA Tahun Anggaran 2018 sudah dibayarkan kepada pihak ketiga, dengan rincian (terlampir) sebagai berikut :

No	Uraian	2019	2018
1.	Kewajiban pajak pada pihak ketiga	Rp. 81,818,-	-
2.	Kewajiban pajak pada pihak ketiga	Rp. 40,000,-	-
	Jumlah	Rp. 121,818,-	-

5.1.1.1.2 Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.1.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2019 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 136,065,518,- naik sebesar Rp. 24,876,525.5,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 111.188.992.50,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Asuransi BMD	Rp. 136.065.518,-	Rp. 111.188.992.50,-
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	Rp. 136.065.518,-	Rp. 111.188.992.50,-

5.1.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2019, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 64.143.000 dan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.943.230,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp. 64.143.000,-	Rp. 7,943,230,-
Persediaan Bahan/Material	-	-
Persediaan Cetak	-	-
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	-
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-
Jumlah	Rp. 64.143.000,-	Rp. 7,943,230,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1.2.1 Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir

Investasi non permanen merupakan saldo dana bergulir yang dikelola oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Investasi non permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2.1.2.2. Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih

Investasi Nonpermanen-Diragukan Tertagih merupakan saldo piutang yang dimungkinkan tidak tertagih dikelola oleh SKPD. Kebijakan diragukan tertagih sesuai dengan kebijakan piutang tidak tertagih.

Investasi non permanen-diragukan tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- tetap sebesar nol atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 40.219.761.389,- naik sebesar Rp. 786.296.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 39.433.465.389,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp.	39.433.465.389,-
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	2.055.908.860,-
Belanja Barang/Jasa		-
Hibah		-
Mutasi Masuk	Rp.	525.764.654,-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	1.795.502.514,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya		-
Koreksi		-
Jumlah	Rp.	40.219.761.389

Jumlah Tambah Aset sebesar Rp. 786,296,000,- (222 buah) terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.445,245,154,- (100 buah)
- 2) Belanja Modal Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp.88,800,000,- (12 Buah)
- 3) Belanja Modal Alat Komputer sebesar Rp.252,250,846,- (110 buah)

Mutasi Kurang Aset Tetap sebesar Rp.72,905.000,- (148 buah) terdiri dari:

- 1) Ekstrakontable Alat rumah tangga sebesar Rp.72,780,000,- (147 buah).
- 2) Ekstrakontable Alat-alat olahraga sebesar Rp.125,000,- (1 buah)

5.2.1.3.1 Tanah

Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.100.000.000,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Tanah	Rp. 3.100.000.000,-	-	-	Rp. 3.100.000.000,-
Jumlah	Rp. 3.100.000.000,-	-	-	Rp. 3.100.000.000,-

Rincian mutasi tanah terdiri dari:

Saldo Awal	Rp.	3.100.000.000,-
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-

Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Grand Total **Rp. 3.100.000.000,-**

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 28.359.499.466,-** naik sebesar Rp.786.296.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 27.573.203.466,-** dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Alat Berat	Rp. 2,972,653,000,-	-	-	Rp. 2,972,653,000,-
Alat Angkut	Rp.14,436,497,543,-	Rp. 747,331,860,-	Rp. 747,331,860,-	Rp.14,436,497,543,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp. 374,850,000,-	-	-	Rp. 374,850,000,-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp. 5,103,330,233,-	Rp. 961,395,654,-	Rp. 516,150,500,-	Rp. 4,658,085,079,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp. 1,714,356,949,-	Rp. 118,425,000,-	Rp. 29,625,000,-	Rp. 1,625,556,949,-
Alat Komputer	Rp. 2,196,035,738,-	Rp. 754,396,000,-	Rp. 502,145,154,-	Rp. 1,943,784,892,-
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat Keamanan	Rp. 1,561,776,003,-	-	-	Rp. 1,561,776,003,-
Alat-Alat Olahraga	-	Rp. 125,000,-	Rp. 125,000,-	-
Jumlah	Rp.28,359,499,466,-	Rp. 2,581,673,514,-	Rp.1,795,377,514,-	Rp.27,573,203,466,-

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin terdiri dari:

Saldo Awal	Rp. 27,573,203,466,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. 2,055,908,860,-
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. 525,764,654,-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 30,154,876,980,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. 72,905,000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. 1,722,472,514,-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Grand Total	Rp. 28,359,499,466,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 8,523,869,968,- naik sebesar Rp. 1,646,086,000,- atau 31,63% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8,523,869,968,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Gedung	Rp. 8,523,869,968,-	-	-	Rp. 8,523,869,968,-
Monumen	-	-	-	-
Jumlah	Rp. 8,523,869,968,-	-	-	Rp. 8,523,869,968,-

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp. 8,523,869,968,-	
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp. 8,523,869,968,-	

5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.180,433,000,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.180,433,000,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Jalan dan Jembatan	-	-	-	Rp. 89,000,000,-
Bangunan Air/Irigasi	Rp. 89,000,000,-	-	-	Rp. 91,433,000,-
Instalasi	Rp. 91,433,000,-	-	-	-
Jaringan	-	-	-	-
Jumlah	Rp.180,433,000,-	-	-	Rp.180,433,000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

Saldo Awal	Rp. 180,433,000,-	
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-

Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	180,433,000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar naik sebesar Rp. 1,661,000,- atau 97 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 55,958,955,- dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2018
Buku Perpustakaan	Rp. 54,297,955,-	-	-	Rp. 54,297,955,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp. 1,536,000,-		Rp. 125,000,-	Rp. 1,661,000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman	-		-	-
Jumlah	Rp. 55,833,955,-	-	-	Rp. 55,958,955,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp.	54,297,955,-
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	1,661,000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp.	125,000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-
Grand Total	Rp.	55,833,955,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, Kontruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau/pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, Kontruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya,

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian pembangunan				2018
	2019	Bertambah	Berkurang	
Jumlah	-	-	-	-

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 24,326,687,864,03 naik sebesar Rp. 1,613,271,730,39 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 24,326,687,864,03 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	2018
	Rp.	Rp.
Alat Besar	2,513,401,397,50,-	2,369,279,775
Alat Angkut	12,304,127,605,50,-	11,642,312,391,13
Alat Bengkel	335,400,000,00,-	322,250,000,00,-
Alat Pertanian	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,456,518,305,00,-	4,191,315,469,40
	Rp. 1,563,300,549,00	Rp. 1,506,837,349,00
Alat Studio dan Komunikasi	-	-
Alat Kedokteran	-	-
Alat Laboratorium	1,426,799,753,00	1,384,073,503,00
Alat Keamanan	1,867,049,603,50	1,691,861,642,00
Komputer	1,340,415,978,20	1,169,321,134,50
Gedung	-	-
Monumen	-	-
Jalan dan Jembatan	33,375,000,00	31,150,000,00
Bangunan Air dan Irigasi	20,572,425,00	18,286,000,00
Instalasi	-	-
Jaringan	-	-
Jumlah	Rp. 25,860,961,156,70	Rp. 24,326,687,864,03

5.2.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Total Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

5.2.3. Ekuitas Dana

Total Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14,558,883,750,30,- turun sebesar Rp.673,900,856.55,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15,232,784,606.85,-

5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.2.1 Pendapatan - LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA, 2019, Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Pendapatan Asli daerah	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-
Jumlah	-	-

5.2.2 Beban

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima, Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.33,583,979,913,55 naik sebesar Rp.2,632,944,922,12 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp.30,951,064,991,43,

5.2.2.1 Beban Operasional

Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 33,585,276,349,60 naik sebesar Rp.4,813,699,275.5,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. Rp. 28,771,577,074.10,-

	2019	2018
Beban Pegawai	Rp. 11,069,829,882,00,-	Rp. 10,995,652,871,00
Beban Barang & Jasa	Rp. 20,981,173,175,00,-	Rp. 15,996,192,871,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 1,534,273,292,67,-	Rp. 1,779,731,332,13
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	Rp. 33,585,276,349,60,-	Rp. 28,771,577,074.1,-

5.2.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp.11,069,829,882,- naik sebesar Rp. 73,637,011,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10,996,192,871,-

	2019	2018
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp. 6,997,764,882,-	Rp. 7,439,788,771,-
Beban Pegawai Langsung	Rp. 4,072,065,000,-	Rp. 3,330,904,100,-
Jumlah	Rp. 11,069,829,882,-	Rp. 10,996,192,871,-

5.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 20,904,783,738,80,- naik sebesar Rp. 2,604,817,348,96,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 18,299,966,390,04,-

	2019	2018
Beban Persediaan	Rp. 6,610,245,880,00,-	Rp. 7,158,998,156,-
Beban Jasa	Rp. 6,797,075,833,88,-	Rp. 5,575,741,815,-
Beban Pemeliharaan	Rp. 1,448,943,870,-	Rp. 764,730,897,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 6,048,518,155,-	Rp. 4,800,495,522,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp. -	Rp. -
Jumlah	Rp. 20,904,783,738,80,-	Rp. 18,299,966,390,04

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1,534,273,292,67 turun sebesar Rp. 78,998,438,26,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1,613,271,730,39

	2019	2018
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp. 1,534,273,292,67	Rp. 1,613,271,730,39
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	Rp. 1,534,273,292,67	Rp. 1,613,271,730,39

5.2.2.1.4. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-

	2018	2017
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen	-	-
Beban Hibah Aset Tetap	-	-
Jumlah	-	-

5,3, Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

	2019	2018
Ekuitas Awal	Rp. 15,232,784,606,85,-	Rp. 12,999,495,927,28
Surplus/Defisit-LO	(Rp. 33,658,056,349,67,-)	(Rp. 30,951,064,991,43)
RK-PPKD	Rp. 34,106,911,917,00,-	Rp. 33,184,353,671,00
Dampak Kumulatif Peruban Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp. 1,196,832,860,-)	-
- Koreksi /Penyesuaian Kurang di Bendahara Pengeuaran	-	-
- Koreksi Penyesuaian Aset Tetap	-	-
- Koreksi Penyusutan/Penyesuaian Penyusutan	-	-
Ekuitas Akhir	Rp. 14,558,883,750,30	Rp. 15,232,784,606,85

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga sebagai amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008, BPBD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Susunan Organisasi Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 10 terdiri dari:

- a. Kalakhar BPBD
- b. Bagian Tata Usaha
 - i. Subbagian Program
 - ii. Subbagian Keuangan
 - iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 1) Seksi Pencegahan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Penanganan Darurat
 - 1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Darurat
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Seksi Rehabilitasi
 - 2) Seksi Rekonstruksi
- f. Bidang Logistik dan Peralatan
 - 1) Seksi Logistik
 - 2) Seksi Peralatan
- g. Satuan Tugas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,